

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pada abad ke 19, kaum perempuan dianggap sebagai makhluk kelas dua, artinya kedudukan perempuan-perempuan Indonesia berada di bawah kedudukan kaum laki-laki. Hal ini sesuai dengan sejarah yang mencatat dalam kebudayaan Jawa, bahwa perempuan sering ditempatkan sebagai “*the second sex*”. Hal tersebut tercermin dari ungkapan Jawa *swarga nunut neraka katut*, yang berarti kebahagiaan atau penderitaan istri tergantung kepada suaminya. Ungkapan tersebut mencerminkan bahwa peran seorang perempuan dalam suatu keluarga hanya sebagai pendukung saja. Rendahnya pendidikan dan kurangnya kemampuan untuk mencari nafkah sendiri membuat kaum perempuan tidak dapat menentukan nasibnya sendiri. Kaum perempuan cenderung bergantung kepada suami mereka, sehingga apabila terjadi pelanggaran terhadap perkawinan seorang istri atau perempuan akan menerima hal tersebut. Kondisi tersebut mengakibatkan kedudukan kaum perempuan baik dalam keluarga dan masyarakat menjadi rendah, sistem adat feodal seperti inilah yang hanya menguntungkan kaum laki-laki dan merupakan penindasan bagi kaum perempuan. Selain itu, adanya adat istiadat yang juga menghalangi anak-anak perempuan untuk mendapatkan pengajaran dan

pendidikan. Anak-anak perempuan banyak yang tidak boleh keluar rumah dan hanya berdiam diri di dalam rumah.¹

Keterbatasan pengetahuan dan keahlian membuat perempuan tidak leluasa menentukan nasib hidupnya sendiri. Adat istiadat yang mengharuskan perempuan absen dari kehadiran public menghalangi anak perempuan dalam mendapatkan akses pengajaran atau pendidikan.² Selain itu, kemiskinan juga menghambat seseorang untuk bersekolah. Padahal, pendidikan dipandang sebagai syarat utama untuk membebaskan diri dari belenggu yang memasung kehidupan perempuan.³

Memasuki awal abad ke-20, pemerintahan kolonial Belanda mengalami pergeseran dalam strategi politik dan ekonominya, yang ditandai dengan penerapan kebijakan baru yang dikenal sebagai politik etis (*Ethische Politiek*). Kebijakan ini memperkenalkan pendekatan berbeda terhadap pendidikan dan menuai respons beragam, baik dari kalangan cendekiawan, politisi, hingga tokoh agama di Belanda sendiri. Sebelum tahun 1901, kebijakan kolonial Belanda sepenuhnya berfokus pada eksploitasi sumber daya dan kepentingan ekonomi, tanpa memperhatikan kesejahteraan penduduk pribumi di Hindia Belanda. Titik balik terjadi ketika Ratu Wilhelmina menyampaikan pidato di hadapan parlemen Belanda (*Staten-Generaal*) pada tahun 1901, yang membuka kemungkinan bagi pemerintah kolonial untuk

¹ Leli Yulifar. Ridha Laeli Insyarah. Peranan Raden Ajeng Sutartinah dalam Memperjuangkan Hak Pendidikan untuk Perempuan melalui Organisasi Wanita Tamansiswa Tahun 1922-1971. *Jurnal Sejarah dan Pendidikan Sejarah*. Vol. 8 (2). 2019. Hlm 173-174.

² Siwi Tyas Fheny Cahyani, dkk. Perjuangan Organisasi Perempuan Indonesia Menuntut Hak Pendidikan Pada Masa Kolonial Belanda Tahun 1912-1928. *Jurnal Pendidikan*. 1(1). 1-14. 2015, hlm 2.

³ Sukanti Suryochondro. *Perkembangan Gerakan Wanita di Indonesia*. Dalam Mayling Oey Gardiner. *Mildred I E. Wageman Perempuan Indonesia Dulu dan Kini*. (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 1996) hlm 292.

menyeimbangkan dominasi penjajahan dengan sebuah "kewajiban moral" terhadap rakyat jajahannya.⁴ Gagasan Politik Etis muncul dari dorongan rasa kemanusiaan, meskipun tidak sepenuhnya terlepas dari kepentingan ekonomi Belanda. Tekanan terhadap pemerintah kolonial muncul dari berbagai pihak, salah satunya melalui karya sastra seperti *Max Havelaar* (1860) yang secara tajam mengkritik praktik penindasan dan ketidakadilan terhadap rakyat Indonesia. Semakin banyak tokoh Belanda yang bersuara untuk mengurangi penderitaan masyarakat pribumi, mendorong terciptanya perubahan dalam kebijakan kolonial.⁵ Politik Etis pada dasarnya mencakup tiga program utama: pengembangan irigasi (*irrigatie*), pemindahan penduduk ke daerah baru (*emigratie*), dan perluasan akses pendidikan (*educatie*). Meski disebut sebagai bentuk "balas budi" atas penderitaan yang telah dialami bangsa Indonesia, dalam pelaksanaannya kebijakan ini tetap sarat akan kepentingan politik. Tujuan ideal yang awalnya diusung Politik Etis kerap kali melenceng dari praktik sebenarnya, karena intervensi dan intrik kekuasaan tetap mewarnai pelaksanaannya.

Meskipun politik etis dilaksanakan hanya untuk keuntungan pihak Belanda, namun politik etis memberikan pencerahan bagi bangsa Indonesia dengan dibuatnya sekolah-sekolah untuk penduduk pribumi. Pada tahun 1907 pemerintah kolonial Belanda mulai mendirikan sekolah-sekolah bagi bumiputera, sehingga mereka dapat menempuh pendidikan. Sekolah yang dibangun seperti *Meer*

⁴ Shelita Bunga Apriyana, dkk. Pengaruh Kebijakan Politik Etis Terhadap Perkembangan Pendidikan di Indonesia. *Jurnal Ilmu Pendidikan dan Sosial (JIPSI)*, Vol. 1 No. 1. 2022, hml. 89.

⁵ Galih Dhimas Rangga. Penerapan Politik Etis di Surabaya Tahun 1911-1930. *Avatara: Jurnal Pendidikan Sejarah*, Vol. 5. No. 3. 2017, hlm. 752.

Uitgebreid Lagere School Onderwijs (MULO), *Algemeen Metddelbare School* (AMS), *Technical Hoogere School* (THS) Bandung, *School tot Opleiding Van Indien Artsen* (STOVIA), *Medical School and Legal Hoogere School* (RHS) atau Fakultas Hukum Batavia.⁶ Pendirian sekolah-sekolah ini berdasarkan kebutuhan pemerintah Belanda seperti staff sipil, medis, dan militer. Pendirian sekolah-sekolah ini, meskipun bertujuan untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja bagi pemerintah kolonial Belanda, ternyata memberikan dampak jangka panjang bagi perkembangan pendidikan di Indonesia. Sekolah-sekolah yang didirikan oleh pemerintah kolonial, seperti MULO dan AMS, membuka peluang bagi pribumi untuk memperoleh pendidikan yang lebih tinggi. Walaupun jumlahnya terbatas dan hanya dapat diakses oleh kalangan tertentu, terutama golongan priyayi atau bangsawan. Pendidikan tersebut hanya dapat dinikmati oleh segelintir orang saja. Sementara rakyat kalangan bawah tidak memiliki cukup modal untuk melanjutkan sekolah.

Situasi pendidikan pada masa itu yang masih bersifat elitis menjadi faktor utama terbatasnya akses pendidikan bagi kaum perempuan. Kondisi ini menimbulkan keprihatinan terhadap nasib perempuan yang semakin termarginalkan dalam dunia pendidikan. Namun, keprihatinan tersebut kemudian bertemu dengan momentum ketika mulai terbuka peluang bagi perempuan untuk memperoleh pendidikan. Hal ini melahirkan sejumlah tokoh, pemikiran, serta gerakan yang secara khusus menaruh perhatian pada isu pendidikan dan perempuan. Dalam konteks tersebut, muncul kesadaran kolektif mengenai pentingnya

⁶ Shelita Bunga Apriyana, dkk. *op. cit.* hlml 89.

memperjuangkan perubahan nasib bangsa yang mulai tumbuh pada awal abad ke-20. Dorongan untuk memperbaiki kondisi bangsa lahir dari ketimpangan sosial yang mencolok akibat kolonialisme dan norma-norma adat yang tidak menghormati hak-hak asasi manusia. Ketidakadilan yang dialami perempuan secara nyata menjadi pemicu munculnya semangat untuk melakukan pembaruan. Salah satu tokoh perempuan yang tergerak oleh situasi ini dan aktif dalam masa pergerakan nasional Indonesia adalah Raden Ajeng Sutartinah. Ia menunjukkan kepeduliannya terhadap isu pendidikan perempuan dengan membentuk organisasi baru bernama Wanita Tamansiswa. Melalui organisasi ini, ia berupaya untuk memberdayakan dan meningkatkan taraf hidup perempuan di lingkungannya.

Keterlibatan Raden Ajeng Sutartinah dalam dunia politik dan jurnalistik bermula setelah ia menikah dengan tokoh pergerakan nasional, Soewardi Suryaningrat, yang lebih dikenal sebagai Ki Hadjar Dewantara. Suaminya, Ki Hadjar Dewantara, kemudian mendirikan sebuah lembaga pendidikan bernama Perguruan Tamansiswa pada tanggal 3 Juli 1922 di kota Yogyakarta. Pada saat pertama kali didirikan, lembaga ini dikenal dengan nama *National Onderwijs Instituut Tamansiswa*.⁷ Berdirinya Tamansiswa menjadi fondasi awal bagi pembentukan Organisasi Wanita Tamansiswa, yang kelak menjadi wadah perjuangan perempuan dalam bidang pendidikan dan kebangsaan.

Raden Ajeng Sutartinah merupakan pendiri Organisasi Wanita Tamansiswa dan menjabat sebagai ketua sekaligus menjadi bagian dari Badan Penasihat untuk

⁷ Ki Soeratman. *Dengan Membina Kebudayaan Daerah Tamansiswa Memperjuangkan Kebudayaan Nasional*. (Yogyakarta: Majelis Luhur Persatuan Tamansiswa. 1985), hlm 4

Pemimpin Umum organisasi tersebut. Selain perannya dalam organisasi, ia juga mengelola jenjang pendidikan anak usia dini dan dasar di lingkungan Perguruan Tamansiswa, yakni Taman Indria (setara dengan taman kanak-kanak) dan Taman Muda (setingkat sekolah dasar). Tak hanya aktif dalam bidang pendidikan, Raden Ajeng Sutartinah juga berkontribusi dalam dunia literasi dan media. Ia rutin menulis artikel yang membahas isu-isu perempuan serta secara aktif mengisi program-program siaran radio. Salah satu stasiun tempat ia sering tampil adalah Radia Mavro di Yogyakarta. Dalam berbagai siaran tersebut, ia kerap mengangkat topik-topik penting seperti etika sosial, persoalan perempuan, warisan budaya, serta karya sastra Jawa.⁸

Hasrat Raden Ajeng Sutartinah untuk membentuk sebuah ruang bersama bagi organisasi dan gerakan perempuan mendapat respon positif ketika ia menjalin kerja sama dengan dua tokoh perempuan lainnya, yakni R.A. Sukonto dan R.A. Suyatin. Kolaborasi antara ketiganya menghasilkan penyelenggaraan Kongres Perempuan yang pertama, yang berlangsung pada tanggal 22 hingga 25 Desember 1928. Dalam kongres ini, sejumlah isu penting dibahas, antara lain pendidikan bagi perempuan, perlindungan terhadap anak yatim dan para janda, praktik perkawinan usia dini, pembaruan terhadap hukum perkawinan Islam, urgensi dalam meningkatkan martabat dan harga diri perempuan, serta penolakan terhadap praktik kawin paksa.⁹ Pada perhelatan Kongres Perempuan pertama tersebut, Raden Ajeng Sutartinah

⁸ Fauziah, N. Peranan R.A. Soetartinah pada Perkembangan Tamansiswa di Yogyakarta Tahun 1922-1971. Fakultas Ilmu Sosial dan Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta. 2010 hlm 84-85.

⁹ Muhadjir Darwin, Gerakan Perempuan di Indonesia Dari Masa ke Masa. Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Vol. 7 (3). 2004, hlm 285.

memang tercatat sebagai anggota panitia, namun perannya tidak sebatas itu, sebab ia juga merupakan salah satu tokoh utama yang menggagas terlaksananya acara tersebut. Pada tanggal 23 Desember 1928, ia diberi kesempatan untuk menyampaikan pidato dengan topik berjudul "*Adab Perempuan*", yang menjadi salah satu bagian penting dari agenda kongres.¹⁰

Berdasarkan pemaparan sebelumnya, penulis merasa terdorong untuk meneliti lebih dalam mengenai perjuangan serta dinamika kepemimpinan Raden Ajeng Sutartinah, khususnya dalam merintis dan mengembangkan Organisasi Wanita Tamansiswa, serta kontribusinya dalam upaya pemberdayaan perempuan melalui organisasi tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap kiprah seorang tokoh perempuan yang memiliki peranan signifikan dalam sejarah, namun selama ini belum banyak mendapatkan sorotan atau perhatian yang layak. Adapun rentang waktu yang dijadikan fokus kajian dimulai dari tahun 1928 hingga 1971. Tahun 1928 dipilih sebagai titik awal karena menjadi momentum penting dimulainya langkah perjuangan Raden Ajeng Sutartinah dalam memberdayakan wanita dengan menjadi salah satu penggagas Kongres Perempuan Indonesia ke-1. Sementara itu, batas akhir penelitian ditetapkan pada tahun 1971, mengingat tahun tersebut menandai akhir masa kepemimpinan beliau sebagai ketua organisasi, sekaligus menjadi tahun wafatnya Raden Ajeng Sutartinah di Rumah Sakit Panti Rapih, Yogyakarta.

¹⁰ Susan Blackburn. *Kongres Perempuan Pertama: Tinjauan Ulang*. (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia. 2007), hlm 131.

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “Bagaimana Kepemimpinan Raden Ajeng Sutartinah dalam Memberdayakan Wanita di Lingkungan Tamansiswa Tahun 1928-1971”

1. Bagaimana Riwayat hidup Raden Ajeng Sutartinah?
2. Bagaimana Organisasi Wanita Taman Siswa sebagai wadah dalam memberdayakan wanita?
3. Bagaimana kepemimpinan Raden Ajeng Sutartinah dalam memberdayakan wanita melalui organisasi Wanita Tamansiswa tahun 1928-1971?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini menjawab semua rumusan masalah yang telah diuraikan kedalam pertanyaan-pertanyaan penelitian. Tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Mendeskripsikan Riwayat hidup Raden Ajeng Sutartinah.
2. Mendeskripsikan Organisasi Wanita Taman Siswa sebagai wadah dalam memberdayakan wanita.
3. Mendeskripsikan kepemimpinan Raden Ajeng Sutartinah dalam memberdayakan wanita melalui Organisasi Wanita Taman Siswa tahun 1928-1971.

1.4 Manfaat Penelitian

Dengan diselesaikannya penelitian ini, diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis, praktis dan empiris, yaitu sebagai berikut:

1. Secara teoritis, penelitian ini dapat berguna sebagai landasan teoritis bagi peneliti untuk memperkaya konsep atau teori yang mendorong perkembangan

ilmu pengetahuan sejarah dan dapat memberikan sesuatu yang positif dalam bidang akademik maupun non akademik. Penelitian ini dapat menjadi landasan teoritis bagi peneliti lain yang akan melakukan penelitian yang berkaitan dengan dinamika kepemimpinan Raden Ajeng Sutartinah dalam memperjuangkan memberdayakan wanita melalui organisasi Wanita Tamansiswa tahun 1922-1971.

2. Manfaat praktis, penelitian ini mempunyai manfaat sebagai pengimplementasikan pengetahuan bagi penulis terkait objek penelitian, sebagai bahan refleksi dan gambaran umum, khususnya bagi masyarakat Yogyakarta di masa sekarang terkait dinamika kepemimpinan Raden Ajeng Sutartinah dalam memberdayakan wanita melalui Organisasi Wanita Tamansiswa.
3. Secara empiris, penelitian ini memberikan bukti dan data konkret mengenai pemikiran dan pandangan tentang perempuan pada masa itu yang dapat digunakan dalam analisis sejarah. Dengan menyajikan analisis mengenai peran Raden Ajeng Sutartinah, dapat memberikan wawasan tentang dinamika gender pada era tersebut. Penelitian ini dapat dijadikan acuan untuk penelitian lanjutan tentang topik-topik yang terkait.

1.5 Landasan Teoritis

1.5.1 Kajian Teoritis

Beragam pandangan telah dikemukakan oleh para ahli dalam mendefinisikan konsep teori, yang bervariasi tergantung pada jenis penelitian yang dilakukan. Kajian teoritis sendiri merupakan bentuk penyajian sistematis yang menjelaskan

secara rinci unsur-unsur penting yang berkaitan dengan topik yang akan diteliti. Tujuan dari kajian ini adalah untuk mengidentifikasi serta menyoroti aspek-aspek yang dapat mendukung proses penelitian, seperti pengertian istilah, konsep-konsep utama, serta teori-teori yang relevan.¹¹ Dalam konteks penelitian ini, penulis mengadopsi sejumlah teori yang berfungsi sebagai pijakan dan kerangka berpikir dalam membahas permasalahan yang diangkat. Teori-teori tersebut digunakan sebagai dasar analisis guna memperkuat argumentasi serta memperjelas arah pembahasan penelitian. Beberapa uraian mengenai kajian teori pendukung penelitian ini:

1. Teori Kepemimpinan Transformasional

Secara umum, kepemimpinan dapat dimaknai sebagai suatu bentuk kemampuan serta kesiapan individu dalam memengaruhi dan mengarahkan orang lain atau kelompok. Hal ini mencakup upaya mendorong, membimbing, mengajak, menggerakkan, hingga jika diperlukan, memaksa pihak lain untuk menerima pengaruh yang diberikan. Tujuannya adalah agar mereka bertindak atau mengambil langkah-langkah tertentu yang mendukung pencapaian sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.¹² Untuk memahami konsep kepemimpinan, diperlukan pemahaman mendalam terhadap perilaku, sifat, serta pendekatan yang dimiliki oleh individu yang diberikan tanggung jawab sebagai pemimpin. Meskipun dalam praktiknya setiap pemimpin memiliki cara yang berbeda-beda dalam

¹¹ Juliansyah Noor. *Metodologi Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertai dan Karya Ilmiah*. (Jakarta: Kencana. 2017), hlm 66-67.

¹² Budi Sunarso. *Teori Kepemimpinan*. (Yogyakarta: CV. Madani Berkah Abadi. 2022). hlm

menjalankan perannya, namun secara prinsip, esensi kepemimpinan tetap serupa, tergantung pada konteks dan lingkungan organisasi tempatnya berfungsi. Setiap bentuk organisasi, apapun jenis dan skalanya, pada dasarnya memerlukan figur atau posisi kepemimpinan guna mengarahkan jalannya aktivitas dan mencapai tujuan bersama.

Menurut Robbins dan Judge, kepemimpinan dapat diartikan sebagai kapasitas seorang pemimpin dalam memengaruhi sekelompok individu guna mencapai satu atau lebih tujuan bersama. Mereka juga menekankan bahwa kepemimpinan yang dinilai efektif dan efisien adalah kepemimpinan yang mampu membangun daya tarik emosional saat menyampaikan pesan. Hal ini disebabkan karena ekspresi wajah serta emosi yang ditampilkan pemimpin ketika berbicara menjadi faktor penting dalam menentukan apakah pesan tersebut dapat diterima dengan baik oleh para pengikut atau bawahannya.¹³

Menurut Robbins dan Judge, terdapat beberapa teori kepemimpinan, diantaranya sebagai berikut: Teori Sifat (*Trait theory of leadership*), Teori Perilaku (*Behavioral theory of leadership*), Teori Kontingensi (*Contingency theory*), Teori Kepemimpinan Karismatik (*Charismatic leadership theory*), Teori Kepemimpinan Transaksional (*Transactional leadership*), dan Teori Kepemimpinan Transformasional (*Transformational leadership*).

Teori Kepemimpinan Transformasional (*Transformational Leadership*) menggambarkan bagaimana seorang pemimpin mampu membangkitkan semangat

¹³ Stephen P. Robbins, Timothy A. Judge. *Organizational Behavior*. (New Jersey: Pearson Education. 2015). hlm 3

serta menginspirasi para pengikutnya untuk menempatkan kepentingan organisasi di atas kepentingan pribadi. Pemimpin dalam model ini tidak hanya menjadi panutan, tetapi juga memberikan pengaruh yang kuat dan mendalam terhadap para bawahannya, sehingga mendorong perubahan sikap dan perilaku yang selaras dengan visi dan misi organisasi.

Kepemimpinan transformasional merujuk pada proses membangun komitmen terhadap sasaran organisasi dan memberi kepercayaan pada pengikut untuk mencapai sasaran tersebut. Kepemimpinan transformasional memiliki empat dimensi, diantaranya sebagai berikut:

- a. Pengaruh ideal merujuk pada tindakan seorang pemimpin yang mengutamakan kepentingan organisasi serta kepentingan orang lain, seperti masyarakat, dibandingkan dengan kepentingan dirinya sendiri. Pemimpin yang menunjukkan sikap tersebut akan memperoleh kepercayaan dan rasa hormat dari para pengikutnya, karena dianggap sebagai sosok panutan yang layak dicontoh dalam perilaku dan keputusan.
- b. Motivasi inspirasional menggambarkan perilaku seorang pemimpin yang mampu membangkitkan semangat dan memberikan dorongan moral kepada bawahannya. Pemimpin dalam kategori ini mendorong partisipasi aktif bawahan dalam merumuskan serta menyatukan visi dan misi organisasi, sehingga tercipta rasa memiliki terhadap tujuan bersama.
- c. Stimulasi intelektual mencerminkan sikap pemimpin yang mendorong bawahannya untuk mengeksplorasi potensi kreativitas yang sebelumnya terhambat oleh sistem birokrasi. Pemimpin memberi ruang bagi munculnya

gagasan-gagasan baru yang inovatif sebagai bagian dari upaya mencapai sasaran organisasi secara lebih efektif.

- d. Pertimbangan individu merujuk pada pendekatan pemimpin yang memperhatikan kemampuan serta kebutuhan masing-masing individu dalam melaksanakan tugas. Pemimpin menjalin komunikasi secara langsung, memberikan kepercayaan dalam pelimpahan tanggung jawab, dan sekaligus berperan sebagai pembimbing yang mendukung pengembangan bawahannya.

Seorang pemimpin perlu menjaga sejumlah sifat dan prinsip penting dalam menjalankan tugasnya, salah satunya adalah etika. Etika menjadi landasan utama yang harus dipegang dalam setiap pengambilan keputusan, membangun hubungan, dan melaksanakan tindakan dalam organisasi. Seorang pemimpin yang menjunjung tinggi nilai-nilai etis umumnya mampu membentuk pengikut yang bekerja secara efektif dan efisien. Selain itu, karakter kepemimpinan yang melayani juga menjadi hal yang esensial. Gaya kepemimpinan ini menekankan pada peran pemimpin dalam mendukung pertumbuhan dan perkembangan individu-individu yang dipimpinnya. Ciri khas dari kepemimpinan melayani mencakup kemampuan untuk mendengar secara aktif, menunjukkan empati, memengaruhi dengan cara yang persuasif, memberikan dukungan, serta memfasilitasi dan mendorong potensi bawahan secara maksimal. Sifat penting lainnya adalah kepercayaan. Kepercayaan menjadi fondasi dalam hubungan antara pemimpin dan bawahannya. Ketika seorang pemimpin menunjukkan kepercayaan terhadap timnya, hal tersebut dapat berdampak besar pada peningkatan kinerja kelompok. Individu atau kelompok yang

merasa dipercaya akan menumbuhkan keyakinan bahwa kepentingan mereka akan dilindungi dan tidak disalahgunakan oleh pemimpinnya.¹⁴

Menurut Robbins dan Judge ada beberapa hal untuk mengidentifikasi kepercayaan terhadap seorang pemimpin, yaitu:

- a. Integritas dianggap hal yang paling tinggi bagi kebanyakan orang, salah satu contoh pemimpin yang konsisten antara apa yang dikatakan dengan apa yang dilakukan.
- b. Kebajikan, seorang pemimpin dapat membuat ketertarikan dari para bawahannya walau jika tidak sedang bersama, salah satunya adalah pemimpin yang memperhatikan dan mendukung bawahannya dan juga bisa membangun ikatan secara emosional.
- c. Kemampuan yang mencakup pengetahuan dan keahlian dalam pekerjaannya hingga kemampuan interpersonal, pemimpin yang memiliki kemampuan dan keyakinan atas kemampuannya akan membuat bawahannya yakin akan bekerja secara efektif.

2. Teori Pemberdayaan Perempuan

Istilah *pemberdayaan* berakar dari kata “daya” yang mengandung makna kemampuan untuk bertindak atau melakukan sesuatu. Ketika kata tersebut mendapatkan awalan *ber-*, menjadi “berdaya”, maka maknanya berubah menjadi memiliki kekuatan, kecakapan, atau kemampuan untuk menghadapi dan menyelesaikan suatu persoalan. Dengan demikian, pemberdayaan dapat dimaknai

¹⁴ Dr. Ahmad Azmy, M.M. *Teori dan Dasar Kepemimpinan*. (Makasar: Mitra Ilmu, 2021). hlm 2-3.

sebagai proses untuk menjadikan sesuatu atau seseorang memiliki kekuatan, kemampuan, serta potensi dalam menghadapi berbagai situasi atau tantangan.¹⁵

Kata *pemberdayaan* berasal dari bahasa Inggris *empowerment*. Dalam Oxford English Dictionary, istilah *empowerment* memiliki dua makna utama. Pertama, *to give ability or enable to*, yang berarti memberikan kemampuan atau memungkinkan seseorang untuk melakukan sesuatu. Kedua, *to give power of authority to*, yang bermakna memberikan kekuasaan atau wewenang. Sementara itu, menurut Ginanjar Kartasasmita, pemberdayaan atau *empowerment* merupakan suatu proses untuk memperkuat potensi masyarakat. Proses ini dilakukan dengan cara mendorong, memotivasi, dan menumbuhkan kesadaran individu maupun kelompok terhadap kemampuan yang mereka miliki, serta mengupayakan pengembangannya secara berkelanjutan.

Pemberdayaan dapat dipahami sebagai suatu proses yang memungkinkan individu menjadi cukup kuat untuk ikut terlibat secara aktif dalam mengendalikan serta memengaruhi peristiwa dan institusi yang memiliki dampak terhadap kehidupannya. Istilah ini juga diartikan sebagai upaya sistematis di mana kelompok atau individu yang sebelumnya berada dalam posisi tidak berdaya, memperoleh kendali lebih besar atas situasi atau kondisi hidup mereka. Bentuk kendali tersebut mencakup penguasaan terhadap berbagai sumber daya, baik yang bersifat fisik maupun intelektual, serta terhadap ideologi yang mencakup sistem nilai, keyakinan, dan pola pikir yang membentuk cara pandang mereka terhadap dunia.¹⁶

¹⁵ Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi ketiga*. (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), hlm. 241.

¹⁶ Edi Suharto, *Pembangunan Kebijakan dan Kesejahteraan Sosial*, (Bandung: Mizan, 2003), hlm.35

Pemberdayaan dapat dipandang sebagai suatu proses perubahan dalam struktur kekuasaan antara laki-laki dan perempuan, yang berlangsung pada empat tingkat utama: keluarga, komunitas, pasar, dan negara. Dalam memahami konsep pemberdayaan, terdapat dua sudut pandang yang dapat digunakan. Pertama, pemberdayaan dipahami sebagai kekuatan dalam pengambilan keputusan, dengan penekanan khusus pada keterlibatan perempuan dalam proses tersebut. Kedua, pemberdayaan dimaknai dalam kaitannya dengan dinamika hubungan antara peningkatan peran perempuan dan dampaknya terhadap laki-laki, terutama dalam konteks sosial yang beragam.¹⁷

Pemberdayaan perempuan merupakan langkah strategis yang bertujuan untuk menghilangkan berbagai hambatan yang menghalangi tercapainya kesetaraan gender dalam setiap tahap pembangunan, tanpa membedakan antara laki-laki dan perempuan. Upaya ini dilakukan agar perempuan memiliki akses dan kontrol terhadap berbagai sumber daya, baik dalam bidang ekonomi, politik, sosial, maupun budaya. Melalui pemberdayaan ini, perempuan didorong untuk dapat mengelola dirinya sendiri, berperan aktif dalam penyelesaian berbagai persoalan, serta mengembangkan kapasitas dan kesadaran akan nilai diri mereka secara optimal.¹⁸

Secara garis besar, tujuan utama dari pemberdayaan perempuan adalah untuk meningkatkan mutu sumber daya perempuan di berbagai sektor kehidupan. Upaya pemberdayaan ini juga diarahkan untuk menumbuhkan kesadaran dan kepedulian

¹⁷ Zakiah Zaki, *Pemberdayaan Perempuan oleh Lajnah Wanita dan Putri Al-Irsyad* Surabaya, (Journal of Social Science and Religion, 2010), hlm. 44.

¹⁸ Novia, Budhy. *Sekilas Tentang Pemberdayaan Perempuan*, (Bangka Belitung: Sanggar Kegiatan Belajar, 2010)

terhadap isu gender di kalangan masyarakat secara luas, termasuk para pembuat kebijakan, pengambil keputusan, perencana program, aparat penegak hukum, serta dalam proses pembaruan regulasi yang mencerminkan nilai-nilai budaya sosial dan keadilan yang berorientasi pada perspektif gender.

Isu pemberdayaan perempuan serta tercapainya kesetaraan gender sejatinya merupakan bagian dari perjuangan hak asasi manusia dan wujud dari upaya mengatasi ketidakadilan sosial. Sangat keliru apabila hal ini dianggap semata-mata sebagai persoalan perempuan. Masalah ini justru menjadi syarat utama dalam menciptakan pembangunan masyarakat yang adil dan setara. Perjuangan untuk menjamin hak asasi perempuan merupakan hasil dari interaksi yang semakin kompleks antar individu yang berasal dari berbagai latar belakang baik pendidikan, profesi, maupun kewarganegaraan.

Adapun pemberdayaan terhadap perempuan adalah salah satu cara strategis untuk meningkatkan potensi perempuan dan meningkatkan peran perempuan, diantaranya sebagai berikut:¹⁹

- a. Mebongkar mitos kaum perempuan sebagai pelengkap dalam rumah tangga.

Terdapat anggapan dalam masyarakat bahwa perempuan adalah *konco wingking* atau *swarga nunut neraka katut*. Anggapan ini membuat perempuan menjadi pasif dan tidak memiliki inisiatif, sehingga nasibnya tergantung pada suami.

¹⁹ Edi Suharto, *Pembangunan Kebijakan dan Kesejahteraan Sosial* cet. Ke-1. (Bandung: Mizan, 2003), hlm 35.

- b. Memberikan beragam keterampilan bagi kaum perempuan, sehingga kaum perempuan juga dapat produktif dan tidak menggantungkan nasibnya terhadap kaum laki-laki. Berbagai keterampilan dapat diajarkan untuk perempuan.
- c. Membuka akses seluas-luasnya bagi perempuan untuk mendapatkan kesempatan menempuh pendidikan merupakan langkah penting dalam mendorong kemajuan mereka. Pendidikan menjadi sarana dasar dalam membentuk perubahan sikap dan perilaku, dari kondisi ketidaktahuan menuju pemahaman. Pada dasarnya, sistem pendidikan tidak membedakan gender, dan justru menjadi instrumen yang sangat strategis dalam mendukung proses pemberdayaan perempuan. Pendidikan dipahami sebagai proses pembelajaran yang berlangsung sepanjang kehidupan seseorang.

Beberapa ahli mengatakan bahwa untuk meningkatkan posisi perempuan adalah melalui pengorganisasian yang dianggap sebagai langkah yang paling konkrit untuk memperdayakan perempuan yang ada di dalam lingkup masyarakat.

3. Teori Emansipasi

Emansipasi pada dasarnya merujuk pada upaya untuk memperoleh hak, kedudukan, politik, maupun kesetaraan derajat, terutama bagi kelompok yang selama ini tidak mendapatkan hak secara adil atau dibatasi perannya dalam kehidupan sosial. Istilah ini juga bermakna sebagai bentuk pembebasan dari belenggu perbudakan serta perjuangan untuk memperoleh kesamaan hak di berbagai bidang kehidupan. Emansipasi wanita sendiri dipahami sebagai proses bagi kaum perempuan untuk melepaskan diri dari posisi sosial-ekonomi yang

terpinggirkan, sekaligus dari aturan hukum yang membatasi ruang gerak mereka dalam mengembangkan potensi dan meraih kemajuan.

Emansipasi adalah pembebasan atau persamaan hak dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat, seperti persamaan hak kaum wanita dengan kaum pria. Selanjutnya emansipasi wanita memiliki arti proses pelepasan diri para wanita dari kedudukan sosial ekonomi yang rendah atau dari pengekangan hukum yang membatasi kemungkinan untuk berkembang dan untuk maju. Salah satu wujud sederhana dari emansipasi yakni ketika wanita tidak menggantungkan hidupnya kepada siapapun dan belajar lebih mandiri. Emansipasi wanita tidak semata-mata berfokus pada kesetaraan antara hak laki-laki dan perempuan untuk mendapatkan kesempatan yang sama dalam beragam bidang.²⁰

Emansipasi wanita juga dimengerti sebagai serangkaian pemikiran atau usaha konkret sebagai gerakan untuk membuka kebebasan kaum wanita untuk mendapatkan kesempatan pendidikan bagi kaum wanita, pemberian kebebasan kepada kaum wanita untuk memperoleh pekerjaan terhormat, keterwakilan wanita dalam birokrasi pemerintah, atau pemberian kebebasan dalam kehidupan sosial-politik sebagaimana yang dapat dimasuki oleh lelaki. Makna sebenarnya dari emansipasi wanita yaitu tentang bagaimana wanita dapat berkembang dan maju dari waktu ke waktu tanpa menghilangkan jati dirinya. Dengan memahami makna

²⁰ Memaknai Emansipasi Wanita Dimasa Kini, hlm 4, Et.al (Cambrige: Cambrigdge Universitas Indonesia, 2024).

emansipasi wanita seutuhnya, wanita turut serta memberikan emansipasi bagi masyarakat dan negara.²¹

Adanya ketimpangan antara laki-laki dan perempuan menuntut adanya usaha untuk mewujudkan keseimbangan serta keharmonisan dalam kehidupan. Gerakan emansipasi perempuan lahir sebagai bentuk perjuangan dalam menegakkan hak-hak perempuan sebagai bagian dari warga negara. Perempuan seharusnya memperoleh kesempatan yang sama dengan laki-laki, baik dalam bekerja sama, menempati posisi sejajar, maupun mengembangkan potensi diri. Upaya untuk menempatkan perempuan pada kedudukan yang setara dengan laki-laki sebagai mitra dalam kehidupan masyarakat inilah yang dimaknai sebagai kesetaraan.

Dalam membicarakan mengenai emansipasi wanita di Indonesia, nama Raden Ajeng Kartini tidak bisa di lepaskan. Sejak bad ke-19, Kartini dikenang sebagai tokoh yang memperjuangkan hak-hak perempuan. Melalui surat-surat yang ia tuliskan kepada sahabat-sahabatnya di Belanda, Kartini menuangkan gagasannya tentang perjuangan kaum perempuan serta pentingnya emansipasi. Sistem sosial dalam masyarakat yang berlandaskan pada ideologi patriarki membentuk pola relasi gender di dalamnya. Pola tersebut dijalankan secara sistematis melalui berbagai

²¹ Maman S. Mahayana. "Gerakan Emansipasi: Suara Pers Perempuan" (Jakarta: Pustaka Obor Indonesia: 2023), hlm 2.

pranata sosial. Dari pola relansi inilah kemudian muncul perbedaan gender. Kartini hidup dalam tatanan seperti itu, dan kondisi inilah yang berusaha ia runtuhkan.²²

Emansipasi wanita dalam pemikiran Kartini berfokus pada cita-cita untuk memperoleh kebebasan dan kemandirian, khususnya dalam bidang pendidikan serta kehidupan rumah tangga. Kartini menginginkan agar perempuan memiliki kesempatan menempuh pendidikan formal dan menolak praktik poligami yang dianggap merugikan kaum perempuan. Bentuk perjuangan yang ditempuh Kartini diwujudkan melalui tulisannya, melalui tulisannya Kartini ingin membuktikan bahwa perempuan juga mampu meraih prestasi.²³

Pemikiran kartini mengenai pentingnya pemerataan pendidikan bagi perempuan menjadi dasar bagi upaya emansipasi dari belenggu tradisi yang membatasi peran mereka. Gagasannya untuk meningkatkan kedudukan perempuan melalui pendidikan berkualitas telah membuka arah baru bagi perkembangan pemikiran dan praktik pendidikan di Indoensia. Selain itu, kartini juga mewariskan semangat nasionalisme yang kokoh. Keyakinannya terhadap persatuan serta rasa cinta tanah air mejadi fondasi bagi keterlibatan aktif perempuan dalam membangun identitas bangsa.²⁴

²² Citra Mustikawati. Pemahaman Emansipasi Wanita (Studi Hermeneutika Makna Emansipasi Wanita dalam Pemikiran Kartini pada Buku Habis Gelap Terbitlah Terang). Jurnal Kajian Komunikasi. Vol 3 No 1 (2015), hlm 68

²³ Ibid, hlm 70.

²⁴ Nuril Karomatillah Arifiah, Almi Novita. Pendidikan dan Nasionalisme: Analisis Pemikiran Raden Ajeng Kartini sebagai Pahlawan Emansipasi Perempuan. Kariman, Vol 11 No 2 (2023), Hlm 322

1.5.2 Kajian Pustaka

Kajian Pustaka merupakan informasi yang relevan dengan masalah penelitian yang dapat diambil dari berbagai sumber seperti artikel jurnal, buku-buku ilmiah, laporan penelitian, karangan-karangan ilmiah, tesis, dan disertai, peraturan-peraturan, ketetapan-ketetapan, buku tahunan, ensiklopedia, dan sumber-sumber tertulis baik tercetak maupun elektronik lain. Informasi-informasi tersebut dapat digunakan sebagai acuan dasar atau pendukung dalam mengatasi permasalahan penelitian.²⁵

Seperti yang dijelaskan dalam isi bacaannya, terdapat tiga jenis sumber yang digunakan dalam penyusunan kajian pustaka. Pertama, sumber primer, yaitu dokumen asli yang ditulis langsung oleh individu yang terlibat dalam peristiwa atau kegiatan tersebut. Kedua, sumber sekunder, yakni tulisan yang disusun oleh pihak lain yang tidak secara langsung mengalami atau terlibat dalam kejadian tersebut. Ketiga, sumber tersier, yang umumnya berfungsi sebagai panduan atau referensi awal untuk menelusuri sumber-sumber lain yang lebih mendalam.²⁶

Kajian Penelitian menggunakan buku karya B.S Dewantara yang diterbitkan tahun 1979 berjudul “Nyi Hajar Dewantara” yang diterbitkan oleh Gunung Agung, buku ini menyajikan gambaran tentang kehidupan dan perjuangan Nyi Hajar Dewantara. Penulis menggunakan buku yang berjudul “Kenangan Tujuh Dasawarsa Wanita Tamansiswa 2 Juli 1922-3 Juli 1992” yang diterbitkan oleh Badan Pusat

²⁵ Widiarsa. Kajian Pustaka (Literature Review) Sebagai Layanan Intim Pustakawan Berdasarkan Kepakaran dan Minat Pemustaka. Media Informasi, Vol 28 (1), 2019, hlm 113.

²⁶ Muannif Ridwan, dkk. Pentingnya penerapan Literature Review pada Penelitian Ilmiah. Jurnal Masohi. Vol 2 No 1 (2021). hlm 44-47.

Wanita Tamansiswa. Buku ini menjelaskan perjalanan organisasi wanita tamansiswa. Buku ini juga membahas mengenai Raden Ajeng Sutartina sebagai pelopor berdirinya organisasi wanita tamansiswa. Penulis menggunakan buku yang berjudul “Biografi Tokoh Kongres Perempuan Indonesia Pertama” yang diterbitkan oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Buku ini menjelaskan mengenai biografi tokoh Kongres Perempuan Indonesia pertama, termasuk Raden Ajeng Sutratinah yang mempunyai peran dalam pelaksanaan Kongres Perempuan Indonesia pertama. Pustaka lain yang digunakan adalah jurnal artikel karya Yulianti tahun 2016 yang berjudul “Konsep Pendidikan Perempuan di Tamansiswa” Universitas Negeri Malang, Jurnal Sejarah dan Budaya. Artikel ini membahas mengenai sistem among yang diterapkan, dan materi yang diajarkan di Tamansiswa mengenai pendidikan kebangsaan, idealism dan cinta tanah air.

1.5.3 Hasil Penelitian yang Relevan

Penelitian yang relevan merupakan studi sebelumnya yang memiliki hubungan erat dengan topik atau judul penelitian yang sedang dilakukan. Tujuan dari penelaahan ini adalah untuk mencegah terjadinya duplikasi terhadap isu atau permasalahan yang serupa. Oleh karena itu, peneliti melakukan kajian terhadap berbagai hasil penelitian terdahulu. Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan, ditemukan sejumlah penelitian sebelumnya yang memiliki kesamaan dalam aspek materi maupun fokus kajian. Dengan demikian, penelitian-penelitian tersebut dapat dijadikan sebagai sumber rujukan sekaligus landasan dalam memperkaya data dan memperkuat proses analisis dalam penelitian ini.

Pertama, penelitian ini dilakukan oleh Kuratul Aini tahun 2007 yang berjudul *“Peranan Organisasi Wanita Taman Siswa dalam Pengembangan Pendidikan di Yogyakarta (1932-1946)”* Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret. Penelitian tersebut berfokus pada Organisasi Wanita Tamansiswa yang berdiri karena adanya adat istiadat yang mengikat sehingga menghambat kemajuan wanita, seperti poligami, kawin paksa, dan lain sebagainya. Penelitian tersebut menjelaskan mengenai struktur organisasi wanita Tamansiswa dan peran organisasi wanita Tamansiswa dalam pengembangan pendidikan yang ditempuh melalui dalam organisasi dan luar organisasi. Karya Kuratul Aini memiliki persamaan dengan penelitian ini yaitu terletak pada pembahasan mengenai organisasi wanita Tamansiswa. Sedangkan, perbedaannya terletak pada fokus penelitian. Penelitian ini berfokus pada kepemimpinan Raden Ajeng Sutartinah dalam memberdayakan wanita melalui organisasi wanita tamansiswa.

Kedua, penelitian ini dilakukan oleh Endah Puspita Sari, Leo Agung Sutimin, dan Akhmad Arif Musadad 2022 yang berjudul *“Nyai Sutartinah’s Nationalism Based On Psychohistory Approach”* International Journal of Education and Social Science Research Vol. 5, No. 6. Penelitian ini membahas mengenai pembentukan jiwa nasionalisme dalam diri Sutartinah yang dipengaruhi oleh latar belakang keluarganya dan peristiwa-peristiwa yang ia alami sepanjang hidupnya. Persamaan penelitian ini adalah membahas Raden Ajeng Sutartinah. Perbedaannya terletak pada fokus penelitian, penelitian tersebut menekankan pada dimensi psikologis dan latar belakang kepribadian tokoh, dengan menyajikan analisis tentang proses pembentukan karakter dan kesadaran nasional Sutartinah sebagai individu. Hal ini

berbeda dengan penelitian ini yang lebih mengkaji kepemimpinan Sutartinah secara organisatoris dan sosial, khususnya dalam pemberdayaan perempuan melalui organisasi Wanita Tamansiswa.

Ketiga, penelitian ini dilakukan oleh Ridha Laeli Insyarah 2019 dalam Jurnal *FACTUM: Jurnal Sejarah dan Pendidikan Sejarah* yang berjudul “Peran Raden Ajeng Sutartinah Dalam Memperjuangkan Hak Pendidikan Untuk Perempuan Melalui Organisasi Wanita Tamansiswa Tahun 1922-1971”. Persamaan penelitian ini yaitu membahas peran Raden Ajeng Sutartinah, dan tahun yang digunakan sebagai penelitian. Perbedaannya terletak pada fokus tujuan, penelitian ini tidak hanya mendeskripsikan peran tokoh, melainkan juga membedah strategi, gaya kepemimpinan, serta tantangan yang dihadapi dalam mengelola organisasi perempuan berbasis nilai-nilai Tamansiswa.

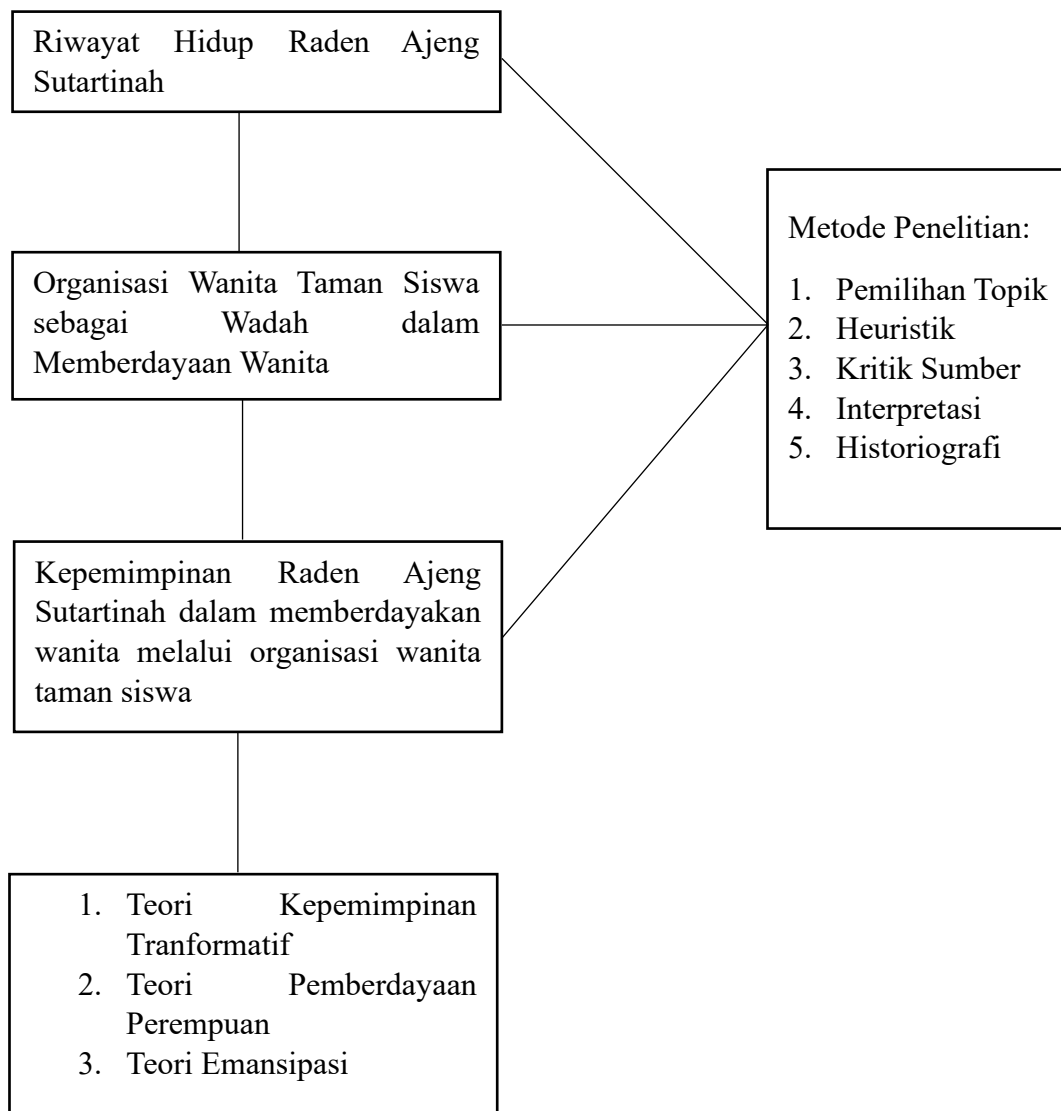
Keempat, penelitian ini dilakukan oleh Annisa Khaerani 2023 yang berjudul “Raden Ajeng Sutartinah: Perjuangannya di Perguruan Tamansiswa Yogyakarta Tahun 1922-1971” Fakultas Adab dan Ilmu Budaya Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Penelitian tersebut menjelaskan mengenai perjuangan Raden Ajeng Sutartinah di perguruan Taman Siswa dalam tiga hal yaitu nasionalisme dan anti nasionalisme, pendidikan perempuan, agama dan kebudayaan. Karya Annisa Khaerani memiliki persamaan dengan penelitian ini yaitu membahas mengenai Raden Ajeng Sutartinah. Persamaan lainnya adalah batasan tahun yang digunakan dalam penelitian. Sedangkan, perbedaannya terletak pada lingkup kajian. Perbedaan terletak pada fokus penelitian, skripsi ini akan membahas mengenai

kepemimpinan dan kontribusi Raden Ajeng Sutartinah dalam memberdayakan wanita, Selain itu skripsi ini berfokus pada organisasi Wanita Tamansiswa.

1.5.4 Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan representasi visual dalam bentuk bagan yang menggambarkan hubungan antar subtopik yang akan dianalisis dalam penelitian. Keberadaan kerangka ini bertujuan untuk membantu peneliti dalam menetapkan batasan serta memperjelas fokus kajian yang akan dikaji. Selain itu, kerangka konseptual berfungsi sebagai acuan dalam penyusunan sistematika penelitian. Dalam konteks ini, konsep dimaknai sebagai suatu bentuk abstraksi atau representasi umum dari sebuah pemahaman. Karena sifatnya yang abstrak, konsep tidak bisa diamati atau diukur secara langsung. Oleh karena itu, agar dapat dijadikan objek pengukuran dan pengamatan, konsep tersebut perlu dijabarkan ke dalam sejumlah variabel yang lebih konkret. ²⁷ Berikut adalah kerangka konseptual penelitian ini:

²⁷ I Putu Sampurna dan Tjokorda Sari Nindhia. *Metodologi Penelitian dan Karya Ilmiah*. (Denpasar: Universitas Udayana. 2018). hlm 8.



Gambar 1. Kerangka Konseptual

Penulis mencoba mengungkapkan pertanyaan penelitian yang telah diangkat sebelumnya dalam rumusan masalah. Pertanyaan penelitian akan dilalui melalui proses interpretasi yang cukup panjang sesuai dengan urutan metode penelitian sejarah menurut pendapat kuntowijoyo. Selanjutnya pertanyaan penelitian tersebut akan dianalisis menggunakan teori yang telah dipaparkan sebelumnya, teori tersebut dijadikan ruang analisis dalam membantu mengungkapkan permasalahan tersebut.

1.6 Metode Penelitian Sejarah

Metode penelitian sejarah adalah suatu himpunan prinsip dan aturan yang tersusun secara sistematis, yang bertujuan untuk membantu peneliti dalam mengumpulkan sumber-sumber sejarah secara efektif, mengevaluasi dan mengkaji sumber-sumber tersebut secara kritis, serta menyusun hasil kajian tersebut dalam bentuk sintesis, umumnya disajikan dalam tulisan ilmiah.²⁸

Penelitian ini menggunakan metode penelitian sejarah menurut Kuntowijoyo. Terdapat lima Langkah yang harus ditempuh dalam suatu penelitian sejarah, yaitu (1) pemilihan topik, (2) heuristik, (3) kritik sumber, (4) interpretasi dan (5) historiografi.²⁹

1.6.1 Pemilihan Topik

Tahap pertama dalam penelitian sejarah yaitu pemilihan topik, pada tahap ini peneliti harus menentukan topik yang akan di kaji. Sejarah mempunyai topik pembahasan yang luas untuk diteliti, sehingga pemilihan topik menjadi langkah awal dalam metode penelitian sejarah. Pemilihan topik sebaiknya dipilih berdasarkan: (1) kedekatan emosional dan (2) kedekatan intelektual.³⁰

Aspek kedekatan secara emosional dengan objek skripsi ini terletak pada latar belakang penulis sebagai akademisi sejarah yang mempunyai ketertarikan terkait Raden Ajeng Sutartinah, karena R.A Sutartinah merupakan sosok penting dalam sejarah pergerakan perempuan dan pendidikan di Indonesia. Peneliti memilih topik

²⁸ Gilbert J. Garraghan, *A Guide to Historical Method*, (New York: Fordham University Press, 1957), hlm 33.

²⁹ Kuntowijoyo. *Pengantar Ilmu Sejarah*. (Yogyakarta: Tiara Wacana. 2013). hlm 69.

³⁰ *Ibid.* hlm 70

ini karena adanya kedekatan personal dan relevansi dengan isu pemberdayaan perempuan yang sangat penting dalam konteks sosial dan budaya saat ini. Sebagai seorang perempuan, peneliti merasa bahwa kepemimpinan R.A. Sutartinah, yang turut serta dalam memperjuangkan hak-hak perempuan melalui organisasi seperti Wanita Tamansiswa, memberikan inspirasi dan pembelajaran berharga mengenai bagaimana pemimpin perempuan dapat menggerakkan perubahan positif dalam masyarakat. Sebagai seorang perempuan yang hidup di era modern, peneliti merasakan pentingnya memahami sejarah perjuangan perempuan, khususnya dalam hal pendidikan dan kesetaraan, Raden Ajeng Sutartinah, dengan kepemimpinannya berhasil memobilisasi perempuan untuk terlibat dalam pendidikan dan berbagai kegiatan sosial. Hal ini menjadi alasan kuat bagi peneliti untuk menggali lebih dalam tentang bagaimana dinamika kepemimpinan Raden Ajeng Sutartinal dalam konteks memberdayakan perempuan.

Selain itu, ketertarikan penulis muncul karean R.A Sutartinah merupakan pelopor organisasi wanita tamansiswa, dimana organisasi ini memiliki peran penting dalam memperjuangkan hak wanita. R.A. Sutartinah juga merupakan salah satu penggagas dalam kongres Perempuan Indonesia. Kongres ini menjadi tonggak penting dalam perjuangan kesetaraan gender di Indonesia. Kisah hidup dan karya-karya R.A. Sutartinah dapat menjadi inspirasi bagi generasi selanjutnya. Penelitian ini diharapkan tidak hanya memberi pemahaman yang lebih luas tentang perjuangan perempuan di masa lampau, tetapi juga dapat memberi wawasan bagi penerapan konsep pemberdayaan perempuan di masa kini.

1.6.2 Heuristik

Tahap kedua dalam penelitian sejarah adalah heuristik, yakni proses pengumpulan data atau sumber-sumber informasi yang relevan dengan topik sejarah yang sedang dikaji. Sumber atau data sejarah, istilah "data" berasal dari bahasa Latin *datum* yang berarti "sesuatu yang diberikan" dikumpulkan sesuai dengan karakter dan jenis penelitian yang dilakukan. Secara umum, sumber sejarah terbagi menjadi dua kategori utama, yaitu sumber tertulis dan sumber tidak tertulis.³¹

Menurut Kuntowijoyo, sumber yang digunakan dalam penelitian ini dibagi menjadi dua yaitu sumber primer dan sumber sekunder.³² Sumber primer adalah informasi yang berasal langsung dari individu yang menyaksikan atau mengalami suatu peristiwa sejarah, meskipun informasi tersebut dituliskan setelah peristiwa terjadi. Sementara itu, sumber sekunder merujuk pada informasi yang disusun oleh pihak yang tidak terlibat secara langsung atau tidak hadir saat peristiwa sejarah berlangsung.

Pada tahap heuristik ini penulis telah mengumpulkan beberapa sumber primer maupun sekunder yang menunjang dalam proses penelitian. Sumber primer yang didapatkan untuk bahan penelitian ini diantaranya berasal dari majalah, beberapa artikel yang berasal dari Majalah Wasita dan Majalah Poesara, keberadaan Museum Dewantara Kirti Griya yang di dalamnya sebagai bukti sejarah dan terdapat

³¹ *Ibid.* hlm 73

³² *Ibid.* hlm 75

berbagai dokumentasi kegiatan Wanita Tamansiswa yang digunakan sebagai sumber penunjang dalam penelitian.

Selain sumber primer terdapat sumber sekunder yaitu buku “Sejarah Organisasi Perempuan Indonesia (1928-1998)” ditulis oleh Mutiah Amini diterbitkan oleh Gadjah Mada University Press tahun 2021. Kemudian buku “Sejarah Perempuan Indonesia Gerakan dan Pencapaian” ditulis oleh Cora VreedeDe Stuers, Pengantar: Ruth Indiah Rahayu diterbitkan oleh Komunitas Bambu tahun 2017. “Kenangan Tujuh Dasawarsa Wanita Tamansiswa 2 Juli 1922-3 Juli 1992” yang diterbitkan oleh Badan Pusat Wanita Tamansiswa. Buku “Suara Wanita Tamansiswa” yang ditulis oleh Nyi Moedjono Probopranowo yang merupakan ketua Badan Pusat yang diterbitkan pada tahun 1995. Buku berjudul “Perkembangan Pergerakan Wanita Indonesia” yang ditulis oleh Ny. Sujatin Kartowijono yang diterbitkan oleh Yayasan Idayu Jakarta tahun 1982.

1.6.3 Kritik Sumber

Tahap ketiga dalam penelitian sejarah adalah kritik sumber, yaitu proses penilaian terhadap sumber-sumber yang telah dikumpulkan pada tahap heuristik. Tujuan utama dari tahap ini adalah untuk menilai apakah sumber-sumber tersebut layak digunakan dalam penelitian sejarah atau tidak. Kritik sumber sangat penting agar peneliti dapat memastikan keaslian (otentisitas) dan keandalan (kredibilitas) sumber sebagai dasar untuk mencapai objektivitas dalam merekonstruksi suatu peristiwa sejarah. Kritik sumber ini terbagi menjadi dua jenis, yaitu kritik ekstern dan kritik intern.

Kritik eksternal merupakan proses evaluasi yang dilakukan terhadap aspek fisik atau luar dari suatu sumber sejarah. Tahapan ini bertujuan untuk menilai keaslian (otentisitas) dokumen atau sumber dengan meneliti karakteristik fisiknya. Penilaian dapat mencakup jenis dan kualitas kertas, bahan yang digunakan, format tulisan, teknik penulisan (misalnya tulisan tangan atau ketikan), serta usia dokumen. Kritik eksternal sering disebut sebagai *lower criticism*, karena fokus utamanya adalah pada autentikasi sumber, berbeda dengan kritik internal atau *higher criticism* yang lebih menekankan pada isi dan makna sumber.³³

Kritik internal merupakan tahapan evaluasi yang berfokus pada isi atau kandungan informasi dari suatu sumber sejarah. Proses ini bertujuan untuk menilai kebenaran, kredibilitas, dan reliabilitas informasi yang disampaikan. Kritik internal dikenal sebagai bentuk *higher criticism*, karena melibatkan penilaian atas substansi, konteks, serta konsistensi data historis. Setelah sumber dinyatakan otentik melalui kritik eksternal, peneliti perlu menguji sejauh mana informasi tersebut dapat dipercaya. Salah satu cara untuk menguji kredibilitas adalah dengan melakukan perbandingan antar berbagai sumber, guna menghindari bias dan memastikan objektivitas dalam penulisan sejarah.

1.6.4 Interpretasi

Tahap interpretasi atau penafsiran merupakan langkah keempat dalam metode penelitian sejarah, yang sering dianggap sebagai ruang potensial bagi subjektivitas peneliti. Tujuan utama dari tahap ini adalah untuk memberikan makna dan

³³ A. Daliman. *Metode Penelitian Sejarah*. (Yogyakarta: Ombak. 2012), hlm 68.

pemahaman terhadap sumber-sumber sejarah yang telah diverifikasi pada tahap sebelumnya. Secara metodologis, interpretasi berkaitan erat dengan keseluruhan proses penelitian dan penulisan sejarah. Dalam pelaksanaannya, peneliti harus melalui dua tahap penting, yaitu analisis, yang mencakup pemecahan informasi ke dalam bagian-bagian yang lebih sederhana, serta sintesis, yakni proses merangkai kembali informasi tersebut untuk membentuk pemahaman yang menyeluruh dan utuh terhadap peristiwa sejarah yang diteliti.³⁴

Dalam penelitian ini, metode analisis diterapkan untuk menguraikan dan mengevaluasi berbagai sumber atau data yang telah diperoleh. Analisis merupakan suatu pendekatan sistematis yang bertujuan untuk mengkaji suatu permasalahan dengan cara memecahnya ke dalam bagian-bagian yang lebih kecil. Melalui proses ini, bukti-bukti sejarah dibandingkan satu sama lain dan dikelompokkan sesuai dengan keterkaitan substansinya. Selanjutnya, dilakukan tahap **sintesis**, yaitu proses integrasi berbagai bukti tersebut guna membentuk rekonstruksi peristiwa sejarah secara runtut dan terstruktur.

1.6.5 Historiografi

Langkah akhir dalam metode penelitian sejarah adalah tahap historiografi, yang merujuk pada proses penulisan sejarah itu sendiri. Historiografi merupakan bentuk penyajian akhir dari seluruh rangkaian penelitian sejarah yang telah dilakukan pada tahapan sebelumnya. Penulisan ini bertujuan untuk menyampaikan hasil penelitian secara runtut, sistematis, dan menyeluruh agar pembaca memperoleh pemahaman yang utuh mengenai proses dan temuan penelitian.

³⁴ Kuntowijoyo, *Pengantar Ilmu Sejarah*. (Yogyakarta: Bentang, 2001), hlm. 100

Menurut Kuntowijoyo, struktur historiografi mencakup tiga komponen utama, yaitu bagian pengantar, hasil penelitian, serta simpulan.³⁵ Dalam bagian hasil, peneliti menyampaikan temuan dalam bentuk tulisan yang didukung dengan data dan fakta yang sudah dikumpulkan selama penelitian. Bagian penutup menyampaikan hasil penelitian dari bab sebelumnya secara keseluruhan.

1.7 Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam penelitian sejarah adalah penjabaran susunan dari seluruh bagian penelitian dari awal, isi, dan akhir. Penelitian ini berjudul “Kepemimpinan Raden Ajeng Sutartinah dalam Memberdayakan Wanita di Lingkungan Tamansiswa Tahun 1928 -1971” yang terdiri dari beberapa bab dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

Pada bagian awal berisikan halaman dengan judul “Kepemimpinan Raden Ajeng Sutartinah dalam Memberdayakan Wanita di Lingkungan Tamansiswa Tahun 1928-1971”, halaman pengesahan, abstrak, kata pengantar, daftar isi, daftar gambar, dan daftar lampiran.

Bab I merupakan bab pendahuluan yang berisi mengenai latar belakang masalah yang menjadi awal dari penelitian yang akan dibahas pada bab-bab berikutnya. Kemudian dibuat rumusan masalah untuk mengetahui bahasan apa saja yang akan dituliskan. Dibuat juga tujuan penelitian untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian dari rumusan masalah. Selain itu, terdapat manfaat penelitian agar penulis dapat mengetahui apa manfaat setelah penelitian ini selesai. Adapun

³⁵ *Ibid.* hlm 103-104

landasan teoritis yang didalamnya terdapat kajian teoritis, kajian pustaka, penelitian yang relevan, dan kerangka konseptual. Dalam bab ini dituliskan juga langkah-langkah penelitian untuk memperjelas tahapan penelitian yang terdiri dari pemilihan topik, heuristik, kritik sumber, intepretasi dan historiografi.

Bab II berisi hasil dari penelitian yang menguraikan mengenai profil Raden Ajeng Sutartinah. Bab ini dimulai dari latar belakang keluarga, pendidikan dan kehidupan Raden Ajeng Sutartinah.

Bab III berisi hasil penelitian yang menguraikan mengenai Organisasi Wanita Taman Siswa sebagai wadah dalam memberdayakan wanita, yang meliputi awal lahirnya organisasi Wanita Tamansiswa, azas, struktur dan peraturan besar Organisasi Wanita Tamansiswa.

Bab IV berisi hasil penelitian yang menguraikan mengenai kepemimpinan Raden Ajeng Sutartinah dalam memberdayakan wanita melalui organisasi Wanita Tamansiswa tahun 1928-1971, yang membahas mengenai pendidikan sebagai sarana pemberdayaan wanita, perjuangan melalui Kongres Perempuan Indonesia, dan tantangan kepemimpinan Raden Ajeng Sutartinah.

Bab V berisi kesimpulan dan saran, pada bab ini kesimpulan merupakan hasil yang disusun berdasarkan hasil uraian bab-bab sebelumnya. Lalu terdapat saran bagi kepentingan praktis dan dapat mengembangkan penelitian lebih lanjut dan menerapkan hasil penelitian dalam konteks yang lebih luas.